



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **HERMAN SUJITO**
2. Jabatan : **KEPALA KANTOR**
3. NHK : **419282**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 2.190.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 99 m2/117 m2 di KAB / KOTA JAYAPURA, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 68 m2/87 m2 di KAB / KOTA KOTA MALANG , HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/36 m2 di KAB / KOTA SIDOARJO, HASIL SENDIRI , Rp. 375.000.000
4. Tanah Seluas 220 m2 di KAB / KOTA JAYAPURA, HASIL SENDIRI Rp. 165.000.000
5. Tanah Seluas 124 m2 di KAB / KOTA KOTA BATU , HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 269.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA MINIBUS Tahun 2004, HIBAH TANPA AKTA Rp. 60.000.000
2. MOTOR, HONDA MATIC Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000
3. MOBIL, MITSUBISHI XPANDER Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 580.000.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp. ---**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp. 88.593.782**



F. HARTA LAINNYA

Rp. 98.983.241

Sub Total

Rp. 3.226.577.023

III. HUTANG

Rp. 250.092.447

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 2.976.484.576

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.